

**TESIS**

**ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM ADMINISTRASI  
PERKARA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK  
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN  
2019 DI PENGADILAN AGAMA PADANG**



**Oleh:**

**RAHMI FADHILA**

**1920112045**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.**

**Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM  
ADMINISTRASI PERKARA MELALUI PERSIDANGAN SECARA  
ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PADANG**

(Rahmi Fadhila, 1920112045, Pembimbing: Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H. dan Dr.  
Delfiyanti, S.H., M.H. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
96 Halaman, 2022)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Persidangan secara elektronik menurut Pasal 1 angka 7 Perma No. 1 tahun 2019 adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lompatan jauh Mahkamah Agung RI dengan menyediakan layanan persidangan secara elektronik tentu memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di pengadilan selama ini, termasuk di Pengadilan Agama. Agar permasalahan yang dibahas semakin fokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan Sebelum Dan Setelah Adanya Perma No 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Padang? 2) Kendala dan Solusi Dari Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Berlakunya Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Padang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris direalisasikan kepada penelitian terhadap hukum yang sedang berlaku. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Sebelum adanya Perma No. 1 tahun 2019, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang dilakukan dengan cara pihak yang berperkara datang mengajukan gugatan secara tertulis. Pada perkara e-court pihak dapat mendaftarkan perkara secara online. Panjar biaya perkara lebih murah karena tidak adanya biaya panggilan kepada penggugat. Pada persidangan yang biasa putusan di bacakan di ruang sidang dengan dihadiri pihak yang berperkara. Pada persidangan elektronik, putusan dianggap sampai pada para pihak apabila telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan. 2) Kendala e-litigasi disebabkan oleh minimnya sosialisasi hukum. Kemudian jaringan internet dan keterbatasan tenaga teknologi informasi. Kendala lainnya yaitu pengguna yang kurang mengerti dengan sistem online. Solusi dari Pengadilan dalam keadaan siap untuk membantu kesulitan pengguna untuk upload dokumen dengan adanya pelayanan di meja *e-court*. Meskipun persidangan secara elektronik sejalan dan bahkan meningkatkan pemberlakuan asas sederhana cepat dan biaya ringan di pengadilan, semuanya kembali bergantung kepada kesepakatan para pihak yang berperkara.

Kata kunci: Asas, Mahkamah Agung, Elektronik.

# **SIMPLE, FAST AND LOW COST PRINCIPLES IN THE ORGANIZATION OF CASES THROUGH ELECTRONIC COURTS BASED ON SUPREME COURT NUMBER 1 YEAR 2019 IN THE RELIGIOUS COURT OF PADANG**

(Rahmi Fadhila, 1920112045, Mentor: Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H. and Dr. Delfiyanti, S.H., M,H Master of Law Postgraduate Program faculty of law Universitas Andalas, 96 Pages, 2022)

## **ABSTRACT**

This research is motivated by the issuance of regulation supreme court No. 1 of 2019 concerning administration and electronic court. court electronically according to article 1 no. 7 Perma No1 of 2019 is a series of examination and trial processes by courts carried out with the support of infoemation and communication technology. So that problems discussed are more focussed, then the problem is formulated as follows: 1) What the implementation of electronic case administration and trials of Perma No. 1 of 2019 in Padang Religious Court? 2) what is the obstacle and solution of electronic trial administration based on Perma No. 1 of 2019 and its effect in the application of the simple, fast and cheap principle at the Padang Religious Court? To answer this question, the research methods taken is an empirical judridical method. Empirical juridical research is manifested in applicable legal research. The result obtained from this research are: 1) before the existence of Perma no. 1 of 2019, cases that enter the padang religious court are carried out by means of the litigant party submitting a lawsuiat in writing. In e-Court cases, they can register online. Down payment costs for e-Court cases are cheaper because there is no summons fee to the plaintiff. In ordinary trial, decissions is read out in the coutroom in the presence of the litigants. In electronic trials, decisions are deemed to have reached the parties if they have been submitted through the court information system. 2) obstacles I the field related to e-litigation are caused by the lack of legal socialization. Then the internet network constraints and limited information technology personnel. Another obstacle is the lack of understanding of the online system. The solution from the Padang Religious Court to overcome the existing obstacles is to make a banner that is installed in the courtyard of the Padang Religious Court office. Solutions from The court are ready to help users who have difficulty uploading documents by profiding services at the e-court desk. Although elecktronic court is consistent and even increase the aplication of the simple principle ofspeedy and low cost oncourt, it all comes back to the agreement of the plaintiffs.

Key word: Principle, Supreme Court, Electronic, .